

Hubungan militer dengan media dalam menghadapi perang informasi

Edys Riyanto, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=73934&lokasi=lokal>

Abstrak

Perang informasi baik sebagai metode komunikasi maupun sebagai suatu bentuk perang merupakan strategi dan taktik yang diambil untuk mencapai superioritas informasi. Keberhasilan dan perang informasi apabila dapat mempengaruhi atau merubah pikiran komandan pihak lawan dan mampu merebut pikiran dan hati rakyat sesuai dengan keinginan yang melancarkan perang informasi. Dalam kepentingan militer untuk menghadapi perang informasi diperlukan jalinan hubungan dengan media.

Di Amerika Serikat pola hubungan militer dengan media yang terjadi, militer melakukan pembatasan-pembatasan terhadap media pada saat krisis/perang, kepentingan nasional terancam dan Negara dalam keadaan bahaya. Hal serupa juga terjadi di Thailand, militer mengambil sikap mengontrol dan intervensi terhadap media demi stabilitas nasional dan kepentingan nasionalnya. Militer Thailand juga berusaha memiliki saham perusahaan telekomunikasi dan media sebagai bentuk lain dari kontrolnya.

Pada periode masa Perang Kemerdekaan (1945-1949), sebenarnya telah terjalin hubungan yang baik antara militer dengan media, meskipun tidak dalam bentuk yang formal. Setidaknya ada titik temu idealisme, satu tujuan merebut dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Periode Masa Demokrasi Liberal (1950-1959), Pola hubungan yang terjadi pada saat itu, walaupun ada kerjasama antara militer dengan beberapa media. Namun media melakukan kontrol yang bersifat subjektif demi kepentingan kelompoknya. Menjelang berakhirnya periode demokrasi liberal ini, pola hubungan yang terjadi adalah adanya kerjasama antara militer dengan media, namun militer melakukan pembatasan-pembatasan terhadap media karena negara dalam keadaan bahaya. Periode masa Demokrasi Terpimpin (1959-1966), ada hubungan yang baik antara militer dengan media yang anti PM untuk menghadapi musuh bersama yaitu PKI, melakukan perang informasi dalam rangka membangun opini publik. Pada masa Orde Baru (1966-1998). Di awal pemerintahan Orde Baru, pola hubungan militer dengan media yang terjadi adalah adanya kerjasama antara militer dengan media. Kontrol mediapun dilakukan secara obyektif dengan mengedepankan supremasi hukum. Pasca peristiwa Malari tahun 1974, pola hubungan militer dengan media berubah yaitu masih ada kerjasama, namun apabila ada hal-hal yang mengganggu stabilitas nasional dan kepentingan nasional, militer mengambil sikap mengontrol dan intervensi terhadap pemberitaan media. Menjelang berakhirnya pemerintahan Orde Baru dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi yaitu munculnya Internet, menjadikan pemerintah tidak berdaya untuk melakukan pembatasan-pembatasan. Melalui media internet ini kontrol mediapun mulai bersifat subjektif.

Pola hubungan militer dan media di era reformasi berkembang secara dinamis seiring dengan perkembangan situasi dan kondisi yang terjadi. Pada awal reformasi, ada kerjasama pihak militer dengan media, namun beberapa media seolah ingin melakukan politik balas dendam atas kejadian di masa lalu. Kontrol yang dilakukan mediapun sangat subjektif. Kondisi demikian berpengaruh terhadap ketahanan nasional, Ada

beberapa media nasional dan bahkan internasional menyampaikan informasi ikut merugikan kepentingan nasional melalui pembentukan opini yang mendiskreditkan pemerintah RI dan TNI di dalam negeri maupun di mata dunia internasional. Hal tersebut juga mengancam terhadap integrasi bangsa dan ketahanan nasional. Dengan tolok ukur kesejahteraan dan keamanan, kondisi tersebut berakibat terhadap kondisi ketahanan nasional saat ini yang relatif rawan.

Information warfare, either in communication method or in the kind of war, is as strategy and tactics that should be taken to reach superiority in information. The successful of information warfare can influence or change the thought of opponent commander and can influence people heart and thought based on the thought of one, who begin information warfare. In military interest, to hold information war is needed relation with media.

In USA, military relation pattern with media happens, military give limitation to media in crisis/war, national interest will be threaten, and the state in danger situation. The same case happens in Thailand; military control and intervene to media for national stability and interest. Thailand military try to have share in telecommunication and Media Company as another kind of control.

In Independence Warfare period (1945-1949), actually there is a good relation between military and media, even though not in formal kind. At least, there is the same point of idealism, and one objective to attain and keep the independence of the Republic of Indonesia. Liberal Democratic Period (1950-1959), the relation pattern, which happen at that time, although there is relation between military and any media. However, media do subjective control for their group interest. When the liberal democratic period will end, relation pattern, which happen, is a relation between military and media, yet military do limitation to media because the country in danger situation. In Leded Democratic period (1959-1966), there is good relationship between military and anti-communist media to hold the same enemy. It is PKI. They do information warfare in order to develop public opinion. In the New Order period (1966-1998), military relation pattern with media, which happens, is cooperation between military and media. Media control is done objectively with law supreme minded. The event post of Malari in 1974, military relation pattern with media change. There is cooperation, but if there is national stability and interest's disturbance, military will take control and intervenes to media news. At the end of New Order government, and information technology develop fast with appearing of Internet, government fell unused to do limitations. Control media can be done subjectively through Internet media.

Military and media relation pattern in reformation era develop dynamically along with the progress of situation and condition, which happen. At beginning of reformation, there is cooperation between military and media, but several media as if want to do revenge politic about the last event. Media control is done subjectively. That condition influences the national resilience. There are several national and international media involve in giving harm information through making opinion, which discredit Indonesian Government and TNI in domestic or international. It threatens the integration of national resilience. With prosperity and security approach, that condition has impact to unstable national resilience condition.